

## KATA PENGANTAR

Laporan kinerja tahun 2020 ini berisikan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang diindikasikan dengan nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Perindag mengemban tanggung jawab terhadap meningkatnya pertumbuhan sektor Perdagangan dan sektor perindustrian di dalam PDRB. Tahun 2020 ini target yang ditetapkan adalah 5,2 % untuk pertumbuhan sektor perdagangan dan 6,5 % untuk pertumbuhan sektor perindustrian. Untuk mencapai target-target tersebut Dinas Perindag disertai anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN dengan jumlah total Rp. 23.326.140.900,- yang terbagi kedalam 2 (dua) urusan yang di breakdown ke dalam 7 (tujuh) buah program.

Namun demikian memasuki awal tahun 2020 kejadian luar biasa dialami bukan hanya wilayah Kalimantan Barat, melainkan seluruh Dunia. Penyebaran virus Covid-19 yang menjadi pandemi merubah segala skenario pembangunan yang sudah direncanakan. Keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama di atas segalanya. Sejalan dengan arahan Pusat dan Pemerintah Provinsi maka dilakukan refocusing anggaran sehingga anggaran yang dikelola menjadi sebesar Rp. 11.941.982.282,- atau sekitar 51,20 % dengan melakukan penyesuaian pagu kegiatan dan penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak memungkinkan dilaksanakan dalam kondisi pandemi.

Pandemi Covid-19 sangat memukul segala lini ekonomi dunia termasuk Kalimantan Barat. Khususnya sektor Perdagangan dan Perindustrian yang mengalami kontraksi cukup dalam. Realisasi Pertumbuhan sektor Perdagangan terkontraksi sebesar 9,40 sedangkan Pertumbuhan industri sebesar 2,41. Hal ini diduga karena pengaruh perubahan pola konsumsi masyarakat dalam menghadapi pandemi sehingga menyebabkan sektor konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 50 % terhadap PDRB mengalami kontraksi. Tentunya kontraksi konsumsi rumah tangga ini sangat mempengaruhi pertumbuhan di sektor perdagangan dan jasa dari sisi lapangan usaha.

Sementara itu permintaan produk industri Kalimantan Barat yang didominasi oleh 3 (tiga) komoditi unggulan; CPO, Alumina, Karet secara umum mengalami penurunan permintaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan penurunan volume produksi ditahun 2020 dibandingkan tahun 2019 walaupun kontribusinya terhadap nilai ekspor meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 61,84 %. Kontribusi ini cukup mendorong pertumbuhan positif ekspor tahun 2020 yang mencapai 7,76 % jauh melampaui pertumbuhan ekspor di tahun 2019 sebesar 4,10 %. Hal ini diduga karena terjadinya kenaikan harga untuk komoditi-komoditi tersebut di pasaran dunia.

Demikian beberapa patah kata yang dapat disampaikan, selanjutnya informasi secara lebih detil dapat dilihat di dalam laporan kinerja ini.



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
A.    GAMBARAN UMUM .....	2
1. <i>SUSUNAN ORGANISASI</i> .....	2
2. <i>TUPOKSI</i> .....	4
3. <i>SUMBER DAYA APARATUR</i> .....	8
4. <i>SUMBER DAYA KEUANGAN</i> .....	8
5. <i>SARANA DAN PRASARANA</i> .....	9
B.    PERMASALAHAN UTAMA .....	10
1. <i>URUSAN PERDAGANGAN</i> .....	10
1. <i>URUSAN PERINDUSTRIAN</i> .....	11
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A.    RENSTRA .....	12
1. <i>VISI</i> .....	12
2. <i>MISI</i> .....	13
3. <i>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</i> .....	15
4. <i>INDIKATOR KINERJA UTAMA</i> .....	15
5. <i>PERJANJIAN KINERJA</i> .....	16
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	17
A.1 <i>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB</i> .....	18
A.2 <i>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di Dalam PDRB</i> .....	22
B.    REALISASI ANGGARAN .....	25
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>27</b>
A.    KESIMPULAN .....	27

## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Laporan kinerja merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap entitas akuntabilitas kinerja termasuk Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini tertuang dalam amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan yang disusun merupakan laporan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan baik itu bersumber dari APBD maupun APBN.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebagai organisasi perangkat Daerah tentunya setiap tahunnya juga berkewajiban untuk menyusun laporan dimaksud.

Sebagai informasi, pada tahun anggaran 2020 sebagaimana tahun sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat juga mendapatkan tugas untuk pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

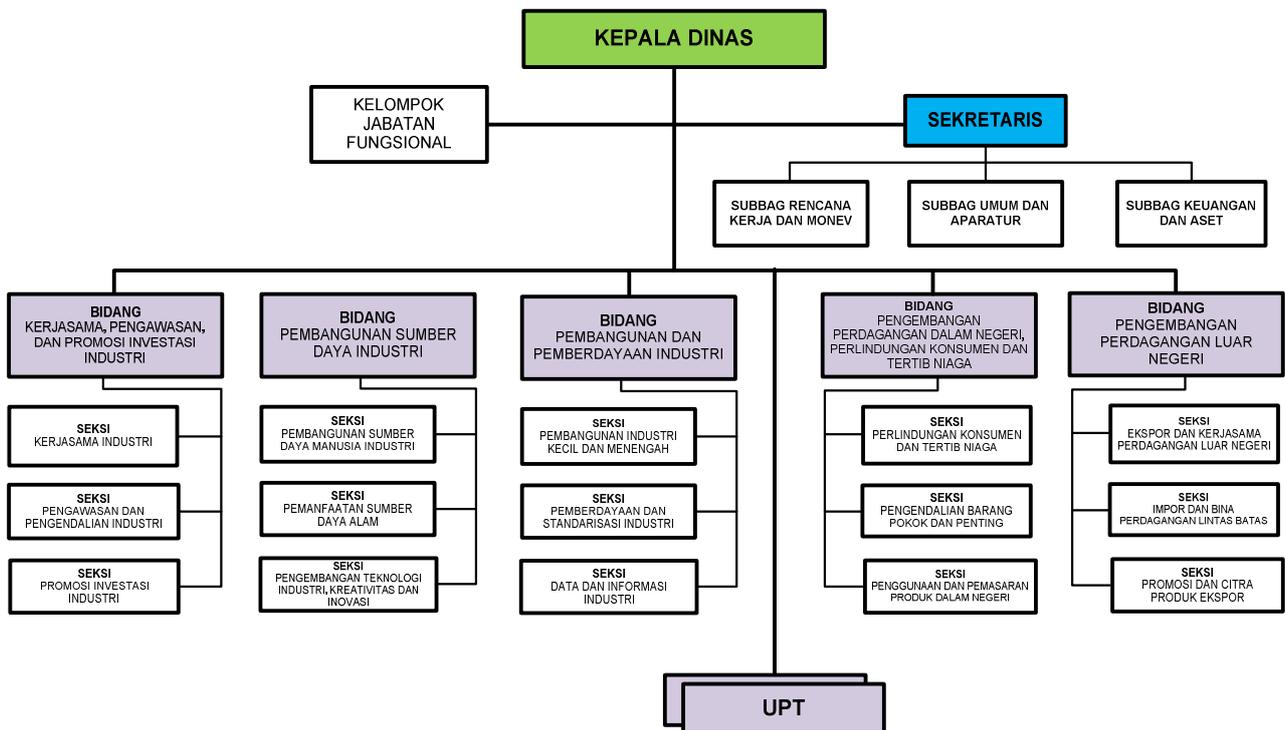
#### 1. SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, berkewajiban melaksanakan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang merupakan urusan pilihan. Untuk lancarnya pelaksanaan pembangunan pada kedua urusan tersebut maka disusunlah organisasi Dinas yang dikepalai oleh kepala dinas setingkat eselon dua atau merupakan jabatan tinggi pratama yang dibantu oleh 5 (lima) bidang dan 1 (satu) sekretariat dengan masing-masing dijabat oleh seorang pejabat administrator atau setingkat eselon 3.

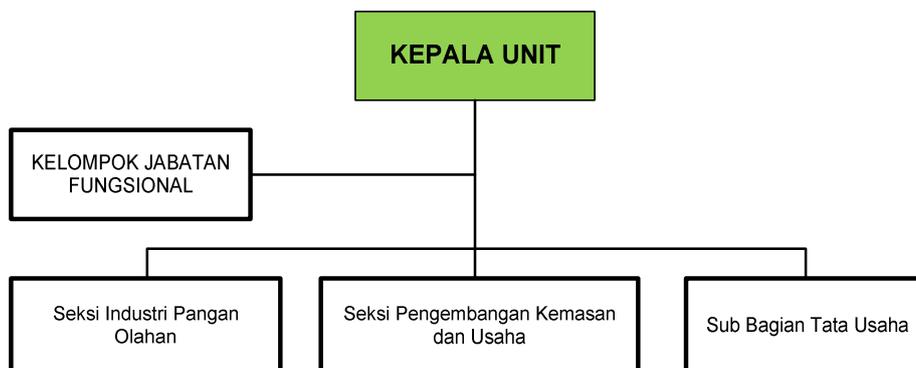
Sementara itu untuk mendukung pelaksanaan pembangunan urusan perindustrian dan perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dibentuk 2 (dua) Unit pelayanan teknis (UPT) yaitu Unit

Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang berdasarkan Pergub Nomor 80 Tahun 2017 untuk urusan Perdagangan dan Unit Pelayanan Industri Pangan Olahan dan Kemasan berdasarkan Pergub Nomor 79 Tahun 2017 untuk urusan perindustrian. Kedua UPT tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat administrator atau setingkat eselon 3.

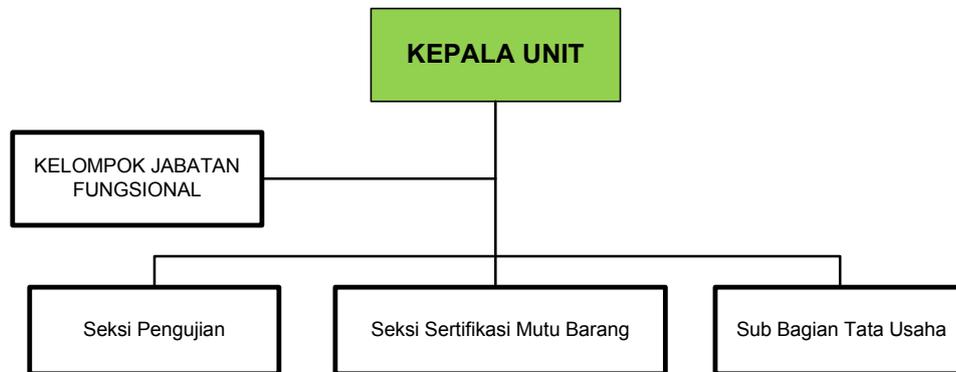
Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pergub 72 Tahun 2018 adalah sebagaimana gambar dibawah berikut :



Sedangkan struktur organisasi UP Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UP PSMB) berdasarkan Pergub Nomor 80 Tahun 2017 adalah seperti gambar dibawah :



Sementara itu struktur organisasi Unit Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UP PSMB) berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 80 Tahun 2017 adalah seperti ditunjukkan pada gambar di bawah:



## 2. TUPOKSI

### 2.1 DINAS

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, maka tugas fungsi dan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

#### A. Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

#### B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan program kerja di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;
2. Perumusan kebijakan di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri;
6. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

## 2.2 UP IPOK

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 79 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UP IPOK maka tugas, fungsi, dan susunan organisasi UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan adalah sebagai berikut:

### A. Tugas

UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang Industri Pangan Olahan dan Kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan program kerja di lingkungan UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang industri pangan olahan dan kemasan;
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang Industri Pangan Olahan;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan kemasan dan usaha;
6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang industri pangan olahan dan kemasan;
7. Pelaksanaan tugas lain di bidang industri pangan olahan dan kemasan.

### **2.3 UP PSMB**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 80 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UP PSMB, maka tugas, fungsi, dan susunan organisasi UP PSMB adalah sebagai berikut:

#### **A. Tugas**

UP Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **B. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UP Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi antara lain :

1. penyusunan program kerja di lingkungan UP Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
2. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UP Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang;
4. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian mutu barang dan/ jasa keperluan sertifikasi ekspor, impor, barang beredar SNI wajib dan komoditi unggulan;
5. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang sertifikasi mutu barang;
6. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu barang kepada eksportir, eksportir produsen dan dunia usaha lainnya;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang;
8. pelaksanaan tugas lain di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.

### 3. SUMBER DAYA APARATUR

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat memiliki sumber daya utama yaitu aparatur dan juga sarana dan prasarana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### A. Aparatur

Adapun Sumberdaya Manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat beserta UPT per Desember 2018 sebanyak 116 orang yang terdiri dari 69 orang Laki-laki dan 47 orang perempuan.

No	Bidang / UPT	Jumlah Pegawai	Pangkat / Golongan				Tingkat Pendidikan					
			I	II	III	IV	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84	-	10	64	10	13	28	8	35	-	-
2	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	18	-	4	13	1	1	10	-	7	-	-
3	UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan	14	-	2	12	-	1	5	1	7	-	-
<b>Total</b>		<b>116</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>89</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun anggaran 2019 menerima anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung baik yang dialokasikan di Dinas itu sendiri maupun yang dialokasikan di UPT.

5.

<b>KODE REKENING</b>	<b>INSTANSI DAN ORGANISASI</b>	<b>ANGGARAN BELANJA</b>
----------------------	--------------------------------	-------------------------

<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>23.907.417.332</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>14.026.016.050</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>9.881.401.282</b>
2.06.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.743.796.382
2.06.01.02	UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN	1.379.408.400
2.06.01.05	UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	2.758.196.500

Sementara itu anggaran yang bersumber dari APBN 2019 berasal dari Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI.

7.

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN BELANJA</b>
1	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	931.507.900
2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	688.985.000
3	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	284..276000
<b>TOTAL</b>		<b>2.060.581.000</b>

8.

## 5. SARANA DAN PRASARANA

Dari sisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menempati kantor di jalan Sutan Syahrir no. 2 Pontianak, kondisi kantor Dinas Perindag untuk saat ini sudah mengalami perluasan sehingga kondisi kerja sudah terasa relatif nyaman karena sudah dapat menampung para pegawai yang ada secara layak sehingga pelayanan umum yang diberikan pun sudah tidak terganggu lagi. Namun masih ada beberapa ruangan yang harus di perbaiki terutama baik lantai satu maupun lantai dua gedung lama eks-Kanwil Depperindag Prov. Kalbar yang perlu direhab. Demikian juga lingkungan kantor perlu dilakukan perbaikan mengingat kerap terjadi banjir pada saat hujan intensitas tinggi. Dalam

pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat, sebagai OPD Provinsi di bidang industri dan Perdagangan, untuk saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat masih memerlukan tersedianya ruangan pameran dan yang berguna untuk menjadi tempat pameran tetap dan display produk industri dan perdagangan di Kalbar dan tempat diskusi / tukar menukar informasi antar pelaku usaha dan dengan aparat.

## B. PERMASALAHAN UTAMA

Urusan perdagangan dan perindustrian merupakan urusan pemerintahan pilihan yang kewenangannya dibagi secara konkurean antara Pusat, Provinsi dan Daerah (Kabupaten/kota). Sebagai urusan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, menjadi tantangan bagi segenap aparatur di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat untuk meyakinkan pengambil kebijakan di level pimpinan tinggi bahwa permasalahan-permasalahan pembangunan pada kedua urusan tersebut berdampak strategis bagi pembangunan di daerah. Namun demikian, tentunya dibutuhkan juga kehandalan aparatur untuk dapat menangani berbagai persoalan yang ada.

Secara umum tercatat beberapa isu-isu atau permasalahan pembangunan pada urusan perdagangan dan perindustrian yaitu permasalahan Perlindungan Konsumen dan tertib niaga, persoalan inflasi dan sistem distribusi logistik daerah, persoalan kinerja perdagangan luar negeri daerah, persoalan hilirisasi industri, pengembangan perwilayahan industri, pemberdayaan IKM serta persoalan data dan informasi industri dan perdagangan.

### 1. URUSAN PERDAGANGAN

1. Struktur ekspor Kalimantan Barat yang masih didominasi oleh tiga komoditi utama yang bersifat primer yaitu karet, hasil tambang, dan produk per kayu (diatas 80% nilai total ekspor total Kalimantan Barat), sehingga perkembangan nilai ekspor Kalimantan Barat masih sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditi tersebut di pasar dunia.

2. Sistem logistik daerah yang tidak efektif dan efisien sehingga menyebabkan rentannya kelangkaan barang dan fluktuasi harga bahan pokok dan bahan strategis masyarakat.
3. Tuntutan akan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang semakin tinggi, dimana saat ini semakin banyaknya peredaran barang dan jasa baik dari dalam maupun luar daerah sehingga diperlukannya peningkatan perlindungan konsumen agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat.
4. Secara Nasional, Realisasi dari IKK sepanjang tahun 2015 sebesar 34,17 terus mengalami penurunan hingga di tahun 2019, dan meningkat sejalan upaya-upaya perlindungan konsumen hingga mencapai skor 41,70. Atau menunjukkan IKK di Indonesia tahun 2019 berada diposisi Mampu. Mampu berarti, Konsumen Indonesia mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik termasuk penggunaan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya.
5. Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Barat kita baru mencapai Indeks keberdayaan konsumen tahun 2018 dan 2019 diangka 39,10. Yang berarti, Konsumen Kalbar tahun 2018 berada di posisi Paham (satu tingkat dibawah mampu dengan skorn minimal 40,1) yaitu konsumen Kalbar memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen untuk melindungi dirinya. Namun belum mampu untuk menentukan pilihan terbaik termasuk penggunaan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya.
6. Permasalahan utamanya masyarakat Kalbar berdasarkan hasil survey tersebut yang dilakukan Kemendag RI Bersama IPB Bogor adalah masih banyak yang masyarakat Kalbar yang belum mengetahui regulasi terkait Perlindungan Kosumen serta Lembaga – Lembaga perlindungan konsumen. Selain itu juga masih rendahnya perilaku Komplain Masyarakat Kalbar atas produk konsumsi yang tidak sesuai yang diterima serta penggunaan produk local dan dalam negeri.

## 1. URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Belum optimalnya hilirisasi komoditi utama Kalbar baik Karet, Kelapa Sawit, maupun Bauksit dimana saat ini masih terpaku pada produk tertentu

(setengah jadi) sehingga perlu upaya pengembangan lebih lanjut yang dibarengi dengan perluasan pangsa pasar, peningkatan inovasi, serta efisiensi proses produksi.

2. Minimnya sarana dan sarana dasar (kelistrikan, air bersih, jalan, dsb) dalam rangka mendukung investasi sektor industri Kalbar. Pentingnya realisasi pembangunan perwilayahan industri baik Kawasan Industri maupun Sentra Industri akan menawarkan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Kalbar.
3. Minimnya kompetensi SDM Industri baik Industri besar maupun IKM yang dapat mengeksplotasi SDA yang dimiliki oleh daerah. Peningkatan SDM Industri merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Belum optimalnya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi SDM Industri perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kedepannya.
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini baik dari sisi ketersediaan akses internet di daerah maupun pengetahuan pelaku usaha IKM yang membutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam mengatasinya. Minimnya koordinasi antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi (dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha industri; serta perumusan kebijakan daerah untuk mendukung industri) diharapkan dapat segera diperbaiki agar dapat meningkatkan peran IKM dalam pengembangan industri Kalbar

## BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

### A. RENSTRA

#### 1. VISI

Masa jabatan gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Oleh karena itu, kondisi Kalimantan Barat saat ini sebagaimana telah

diuraikan pada bab sebelumnya serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018–2023, yaitu:

**"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN"**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai.

## 2. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur,** yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air

bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri Pengolahan.

5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

### 3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Melalui pelaksanaan misi tersebut, Dinas Perindag Provinsi Kalbar berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB	1.1	Meningkatnya dan Berkembangnya Perdagangan Luar Negeri
		1.2	Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	2	Terbangunnya dan terberdayanya industri Kalbar

### 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagai bentuk penjabaran tujuan dan sasaran strategis diukur melalui Indikator Kinerja Utama setiap sasaran strategis sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	Target Kinerja 2020	Bidang Penanggung Jawab
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

<b>1</b>	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN DI DALAM PDRB	1.1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	5.2	DAGRI, DAGLU, DAN UPSMB
<b>2</b>	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI DI DALAM PDRB	2.1	Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	%	6.5	KPPII, PSDI, PPI, DAN UPT IPOK

## 5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar dan Gubernur Kalimantan Barat terpilih mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP serta mempedomani target-target Gubernur Kalimantan Barat yang dilimpahkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, dengan format seperti yang digambarkan dalam tabel di bawah:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1</b>	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN DI DALAM PDRB	1.1 Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	5.2 %
<b>2</b>	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI DI DALAM PDRB	2.1 Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	6.5 %

PROGRAM		ANGGARAN	KET
<b>1.</b>	<b>Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Rp. 1.800.876.500,-</b>	<b>APBD</b>
<b>2.</b>	<b>Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>Rp. 1.619.065.000,-</b>	<b>APBN</b>
<b>3.</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan Perdagangan Luar Negeri</b>	<b>Rp. 573.405.500,-</b>	<b>APBD</b>

PROGRAM		ANGGARAN	KET
	<i>Dukungan UPSMB</i>	Rp. 3.462.286.000,-	APBD
	<i>Dana Alokasi Khusus</i>	Rp. 3.125.000.000,-	APBN
4.	<b>Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri</b>	Rp. 1.779.687.000,-	<b>APBN</b>
5.	<b>Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Industri</b>	Rp. 3.557.940.000,-	<b>APBD</b>
	<i>Dukungan UPT IPOK</i>	Rp. 2.597.906.000,-	APBD
6.	<b>Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	Rp. 1.325.236.000,-	<b>APBN</b>
7.	<b>Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan</b>	Rp. 3.484.738.900,-	<b>APBD</b>
	<i>Sekretariat</i>	-	APBD
<b>TOTAL</b>		Rp. 23.326.140.900,-	<b>APBD + APBN</b>

## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada awalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat mengelola anggaran untuk tahun 2020 sebesar yang tersebut pada perjanjian kinerja di atas. Namun di tengah perjalanan terjadi kondisi force majeure yaitu muncul wabah pandemi Covid 19 di awal tahun 2020 menyebabkan harus dilakukan refocusing anggaran di segala lini pembangunan untuk mendukung lini sektor kesehatan dalam menangani pandemi. Bahkan Dana Alokasi Khusus yang sedianya dilalokasikan untuk pengadaan peralatan laboratorium Pengujian pada UP PSMB dialihkan langsung oleh Kementerian Keuangan untuk penanganan Covid.

NO	PROGRAM	PAGU (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen	780.007.700	APBD
2.	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, PKTN	688.985.000	APBN
3.	Program peningkatan dan pengembangan Perdagangan Luar Negeri	251.576.000	APBD
	Dukungan UPSMB	2.758.196.500	APBD
	DAK Pasar	0	
4.	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	284.276.000	APBN
5.	Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Industri	1.566.335.900	APBD

	Dukungan IPOK	1.379.408.400	
6.	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.087.320.000	APBN
7.	Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan	3.145.876.782	APBD
	Sekretariat		
		<b>11.941.982.282</b>	<b>APBD + APBN</b>

#### A.1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk sasaran strategis "meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB" sebagai telah ditetapkan di dalam dokumen rencana strategi untuk tahun 2020 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
	Meningkatnya Pertumbuhan sektor Perdagangan di Dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	5.2 %	- (9.40) %	- (101.41)

Sebagaimana tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan sektor perdagangan mengalami kontraksi yang sangat dalam mencapai 9.40 (TW 4 Y-O-Y). Pandemi Covid 19 yang mulai menyebar di awal tahun 2020 sangat memukul sektor perdagangan.

#### A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di Dalam PDRB	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen (APBD)	780.007.700	743.308.100	95,29	- 9.40	- (101.41)
	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (APBN)	688.985.000	424.576.379	61.62		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	3.009.772.500	2.971.011.949	98.71		
	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	284.276.000	243.270.350	85.58		
	<b>Total</b>	<b>4.763.041.200</b>	<b>4.382.166.778</b>	<b>92.01</b>		

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penyebaran pandemi Covid 19 sangat memukul sektor perdagangan yang terdiri dari perdagangan yang terdiri perdagangan besar dan eceran. Reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontraksi sebesar 9.40.

Dinas perindag tentunya dengan pihak-piihak terkait lainnya sudah berusaha seoptimal mungkin untuk dapat menahan dampak negative pandemi terhadap pertumbuhan perdagangan. Namun demikian memang tahun 2020 ini dengan sangat menyesal tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4.8 % bahkan sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Total anggaran yang digelontorkan untuk sektor perdagangan ini sebesar Rp. 4.763.041.200 dengan terdiri dari 4 buah program baik yang bersumber dari APBD maupun APBN belum dapat menahan dampak negative yang ditimbulkan oleh pandemi. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa serapan anggaran mencapai Rp. 4.382.166.778 atau sebesar 92,01 %. Dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 9,40 % dibandingkan TW 4 tahun 2019 membuat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menjadi terkoreksi sangat dalam yaitu sebesar – (101.41%).

**b. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SAT	Realisasi			Target 2021
					2018	2019	2020	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN DI DALAM PDRB	1.1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	4.85	5.82	-9.40	3,99-5,53

Menambahkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadinya pandemi sangat memukul sektor perdagangan yang mencapai kontraksi sebesar 9.40. Dengan target pernyataan kinerja sebesar 4.8 % tentunya ini menjadi sebuah catatan tersendiri. Dampak ini dirasakan oleh seluruh dunia. Jika melihat pada tahun-tahun sebelumnya yaitu di tahun 2018 dan 2019 pencapaian pertumbuhan sektor perdagangan Kalimantan Barat sebenarnya berada pada tren yang positif. Namun demikian kontraksi -9.40 jangan diartikan bahwa sektor perdagangan Kalimantan barat mengalami penurunan transaksi yang parah. Hal ini hanya menggambarkan bahwa nilai sektor perdagangan ditahun 2020 berdasarkan PDRB berkurang sekitar 9.40 % dari nilai pada tahun 2019.

Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait kontraksi sektor perdagangan dapat dilihat berdasarkan tabel nilai PDRB Kalimantan Barat 2020 menurut pengeluaran di bawah ini :

NO	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)	Kontribusi TW4 (%)
1	<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>-0.19</b>	<b>49.54</b>
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1.88	1.31
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0.76	14.46
4	Pembentukan Tetap Bruto	-1.14	31.67

5	Perubahan Inventori	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	7.76	10.27
7	Dikurangi Impor barang dan jasa	-21.14	5.80
	PDRB (c-o-c)	-1.82	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi 50 % terhadap PDRB Kalimantan Barat tahun 2020. Sementara laju pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar 0.19. Hal ini dapat diartikan bahwa di tahun 2020 telah terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dibandingkan pada tahun 2019. Besar kemungkinan hal ini diakibatkan oleh dampak pandemi yang menyebabkan masyarakat mengalami penurunan daya beli. Penurunan ini bisa disebabkan karena pendapatan yang berkurang ataupun masyarakat lebih memprioritaskan untuk membeli kebutuhan pokok / primer dibandingkan kebutuhan sekunder atau tersier. Tentunya hal tersebut berdampak pada penurunan omset usaha ritel atau perdagangan eceran yang signifikan, sebagaimana digambarkan pada laju pertumbuhan sektor perdagangan yang terkontraksi hingga 9,40 %. Dari sisi ekspor Kalimantan Barat memang mengalami kenaikan sebesar 7,7 %. Namun perlu menjadi catatan bahwa komposisi ekspor Kalimantan Barat di dominasi oleh ekspor Pertambangan serta produk Hasil Industri pengolahan yang sebagian besar adalah CPO, Alumina dan Karet. Nilai ekspor sebagaimana tersebut di atas hanya berkontribusi sebesar 10,27 % dari total PDRB Kalbar. Pertumbuhan positif sebesar 7.76 % belum mampu menopang Pertumbuhan PDRB dalam hal ini sektor Perdagangan karena penurunan pada perdagangan ritel dan jasa yang dipengaruhi penurunan dan perubahan pola konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan kenyataan tersebut Langkah-langkah di tahun 2021 serta tahun-tahun ke depan untuk mendongkrak atau memulihkan sektor perdagangan yaitu :

1. Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Kalbar,
2. pembinaan pelaku ekspor impor,
3. pencarian akses pasar,

4. peningkatan kualitas produk berorientasi ekspor.
5. Koordinasi dengan Kementerian terkait dengan kewenangan yang ada pada Kementerian terkait dengan usulan perubahan peraturan dan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan PLBN di Kalbar.
6. Mendorong penggunaan produk-produk local yang diproduksi di dalam daerah melalui promosi perdagangan dalam negeri.

## A.2 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di Dalam PDRB

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk sasaran strategis "meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB" sebagai telah ditetapkan di dalam dokumen rencana strategi untuk tahun 2020 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
	Meningkatnya Pertumbuhan sektor Industri di Dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	5.25 %	- (2.41) %	- (93.65)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor industri mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,41 %. Nilai tersebut jauh dibawah target yang ditetapkan sebesar 5,25 %. Akan halnya dengan sektor Perdagangan penurunan ini ditengarai sebagai akibat dari dampak pandemi yang juga berimbas pada penurunan permintaan produk industri yang dihasilkan di Kalimantan Barat yang didominasi oleh industri CPO, Alumina dan Karet.

### A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Program	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian di Dalam PDRB	Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Industri	2.945.743.400	2.748.378.486	93.30	- 2.41	- (93.65)
	Program Penumbuhan dan	1.087.320.000	931.507.900	85.67		

	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (APBN)					
	<b>Total</b>	<b>4.033.063.400</b>	<b>3.679.886.386</b>	<b>91.24</b>		

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya mengalami penurunan yang dalam sebesar 93.65%. Dengan total anggaran untuk sektor perindustrian sebesar Rp. 4.033.063.400 dan terserap sebesar Rp. 3.679.886.386 atau 91,24 % tentunya belum mampu untuk mendorong pertumbuhan PDRB di tengah situasi pandemi. Terlebih untuk peningkatan sektor industri diperlukan dukungan sektor lainnya seperti infrastruktur jalan, Pelabuhan, air baku industri, serta energi.

### **B. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI %			TARGET 2021 %
			2018	2019	2020	
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERINDUSTRIAN DI DALAM PDRB	Pertumbuhan Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	9.16	6.05	-2.41	7,55 - 7,67

Data di atas menggambarkan tren yang tidak terlalu menggembirakan di mana pada tahun 2018 pertumbuhan industri mencapai 9.18 % namun kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 6.05 %. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 kondisi perekonomian diwarnai oleh perselisihan atau perang dagang antara Amerika dan China sehingga hal tersebut mempengaruhi permintaan produk industri Kalimantan Barat yang di dominasi oleh produk bahan baku seperti CPO dan Karet.

Sementara untuk fenomena tahun 2020 tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi berampak nyata terhadap kontraksi pertumbuhan bukan hanya industri yang dirasakan hampir di seluruh dunia.

Tabel di bawah berikut dapat menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan :

NO	GOLONGAN BARANG	VOLUME PRODUKSI (juta Kg)		KONTRIBUSI EKSPOR %		PERTUMBUHAN EKSPOR %	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020

1	Bijih, kerak dan abu logam (HS 26)	13.587,23	17.126,33	42.40	25,26	4.10	7,76
2.	Lemak & Minyak hewan / nabati (HS 15)	259,36	191,45	20,59	27,69		
3.	Bahan Kimia Anorganik (HS 28)	1.061,56	909,99	16.63	19,16		
4.	Karet dan barang dari karet (HS 40)	62,39	71,25	7.41	6,89		
5.	Kayu, barang dari kayu (HS 44)	71,61	71,67	4.76	8,10		
6	Lain-lain						
	total	15.326,24	18.732,21	100	100		
	Kontribusi industri	1.454,92	1.244,36	49.39	61.84		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang diarsir yaitu untuk nomor 2 hingga nomor 5 adalah bagian dari industri pengolahan. Sementara untuk nomor 1 adalah sektor pertambangan yaitu Bauksit. Untuk HS 15 merupakan produk CPO di mana terjadi penurunan volume produksi dari 259,36 juta Kg di tahun 2019 menjadi 191,45 juta kg pada tahun 2020. Sedangkan untuk HS 28 merupakan produk alumina yang pada tahun 2019 sebesar 1.061,56 juta kg turun di tahun 2020 menjadi 909,99 juta kg. Menariknya bahwa sementara sektor industri pengolahan lainnya mengalami penurunan produksi justru untuk industri karet dan barang karet (HS 44) mengalami kenaikan dari 71,61 juta kg di tahun 2019 menjadi 7,67 juta kg pada tahun 2020.

Jika dikaitkan dengan sisi pengeluaran dari PDRB terlihat bahwa walaupun secara umum sektor industri pengolahan mengalami penurunan, namun kontribusinya terhadap total ekspor mengalami kenaikan cukup signifikan, dari sebesar 49,39 % di tahun 2019 menjadi sebesar 61,84 % di tahun 2020. Kontribusi tersebut juga pada akhirnya memberi dampak pada naiknya pertumbuhan ekspor 2020 dibanding tahun 2019 sebesar 7,76 %. Hal ini diduga bahwa kenaikan nilai ekspor ada kaitannya dengan kenaikan harga komoditi ekspor yang menjadi komoditi ekspor utama Kalimantan Barat yaitu Alumina, CPO, serta Karet (SIR). Sementara dari sisi permintaan mengalami penurunan kecuali untuk produk dari karet.

Belum tercapainya target Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kalbar disebabkan belum optimalnya upaya hilirisasi industri di Kalbar dari segala sisi.

Sektor industri pengolahan Kalimantan Barat masih sebatas pada pemenuhan produk industri bahan baku seperti Alumina, CPO, dan Karet.

Berdasarkan hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian ke depan adalah :

1. Hilirisasi industri dari penghasil bahan baku menjadi bahan turunan, sehingga didapat nilai tambah yang signifikan serta dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur industri seperti jalan, energi dan Pelabuhan. Diharapkan dengan beroperasinya Pelabuhan Kijing serta dibangunnya Kawasan ekonomi khusus akan menarik masuknya investasi industri.
3. Mendorong terbangunnya Kawasan industri, dengan terbangunnya Kawasan ekonomi khusus akan dapat menarik investasi perusahaan Kawasan industri.
4. Perkuat implementasi Rencana pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPIP Prov Kalbar 2017 – 2037, di mana di dalamnya terdapat arah pembangunan industri untuk 7 komoditi unggulan Kalimantan Barat, yaitu Bauksit, Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Karet, Kayu, Hasil tanaman pangan, serta hasil laut dan perikanan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Secara umum anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar berasal dari dua sumber yaitu APBD Prov. Kalbar dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Rekapitulasi anggaran beserta realisasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar dapat dilihat pada tabel di bawah:

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen (APBD)	780.007.700	743.308.100	95,29

Perdagangan di Dalam PDRB	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (APBN)	688.985.000	424.576.379	61.62
	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	3.009.772.500	2.971.011.949	98.71
	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (APBN)	284.276.000	243.270.350	85.58
	<b>jumlah</b>	<b>4.763.041.200</b>	<b>4.382.166.778</b>	<b>92.01</b>
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian di Dalam PDRB	Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Industri	2.945.743.400	2.748.378.486	93.30
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka (APBN)	1.087.320.000	931.507.900	85.67
	<b>Jumlah</b>	<b>4.033.063.400</b>	<b>3.679.886.386</b>	<b>91.24</b>
	Dukungan Sekretariat	<b>3.145.876.782</b>	<b>3.000.059.006</b>	<b>95.36</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>11.941.982.282</b>	<b>11.062.112.170</b>	<b>92.63</b>

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat memangku tanggung jawab untuk mencapai 2 (dua) buah sasaran strategis yaitu untuk meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan sektor perindustrian di dalam PDRB. Sebelumnya perlu diinformasikan kembali sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2, bahwa telah dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi dalam jumlah yang signifikan. Dari total awal anggaran Dinas Perindag berjumlah Rp. 23.326.140.900,- menjadi Rp. 11.941.982.282 atau sebesar 51,20 %.

a. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan di Dalam PDRB

Sasaran strategis ini didukung oleh 4 (empat) buah program yang didanai dari APBD dan APBN. Program yang didanai oleh APBD adalah Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dengan pagu sebesar Rp. 780.007.700,- realisasi sebesar Rp. 743.308.100,- atau sekitar 95,29 %. Sementara Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 3.009.772.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.971.011.949,- atau 98,71 %.

Sedangkan program yang bersumber dari APBN adalah Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 688.985.000,- terealisasi Rp. 424.576.379,- atau sebesar 61,62 %. Sedangkan program Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 284.276.000,- terealisasi sebesar Rp. 243.270.350,- atau sekitar 85,58 %.

#### b. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian di Dalam PDRB

Sasaran strategis ini didukung oleh oleh 2 (dua) buah Program yang bersumber dari APBD dan APBN. Program yang bersumber dari APBD yaitu Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Industri dengan anggaran sebesar Rp. 2.945.743.400,- terealisasi sebesar Rp. 2.748.378.486,- atau sekitar 93,30 %. Sedangkan program yang bersumber dari APBN yaitu Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka Dengan anggaran sebesar Rp. 1.087.320.000,- terealisasi sebesar Rp. 931.507.900,- atau sekitar 85,67 %.

## BAB 4 PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2018 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Dalam menjalankan urusan perindustrian dan perdagangan Kalimantan Barat, pada tahun 2018 Dinas Perindag Prov. Kalbar di perkuat oleh 112 orang pegawai dengan susunan 1 orang Kepala Dinas, 1 orang sekretaris, 6 kepala bidang, 2 kepala UPT, serta 24 orang pejabat eselon IV. Dinas juga didukung oleh Pejabat fungsional seperti Penguji Mutu Barang, Arsiparis dan

Penyuluh industri. Selain itu pada TA 2019 Dinas Perindag Prov. Kalbar didukung oleh 3 (tiga) Satuan Kerja (Satker) yang menangani Dekonsentrasi APBN.

3. Saat ini Dinas menempati 1 unit gedung dan UPT yang menempati Gedung masing-masing yang berlokasi di Kota Pontianak. Kendala yang dihadapi terkait dengan sarana prasarana adalah lingkungan kantor perlu dilakukan perbaikan mengingat kerap terjadi banjir pada saat hujan intensitas tinggi.
4. Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Perindag Prov. Kalbar mengemban 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan melalui program-program yang bersumber dari APBD dan APBN.
5. Total anggaran yang diterima oleh Dinas Perindag bersumber dari APBD dan APBN sebagaimana tercantum dalam pernyataan kinerja sebesar Rp. 23.326.140.900,-. Namun kemudian dilakukan refocusing anggaran guna penanganan pandemi sehingga total anggaran yang dikelola menjadi sebesar Rp. 11.941.982.282,- atau sebesar 51,20 % dari anggaran awal.
6. Realisasi terhadap target IKU pada TA 2020 merosot tajam sehubungan dengan terjadinya pandemi dengan rincian sebagai berikut:
  - i) Sasaran strategis 1 (SS1) "MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN DI DALAM PDRB" realisasi sebesar - (9.40)
  - ii) Sasaran Strategis 2 (SS2) "MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI DI DALAM PDRB" memperoleh rata-rata capaian sebesar – (2.41)
7. Realisasi anggaran dari total anggaran akhir berjumlah Rp. 11.941.982.282,- terealisasi sebesar Rp. 11.062.112.170,- atau sebesar 92,63 %, dengan rincian:
  - (1) Anggaran program untuk sasaran 1; meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan sebesar Rp. 4.763.041.200,- terealisasi sebesar Rp. 4.382.166.778,- atau 92,01 %.
  - (2) Anggaran program untuk sasaran 2; meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian sebesar Rp. 4.033.063.400,- terealisasi sebesar Rp. 3.679.886.386,- atau 91.24 %.

8. Langkah-langkah yang harus diambil untuk pemulihan pertumbuhan sektor perdagangan dan perindustrian adalah:

- (1) Mempersiapkan fasilitas-fasilitas utama dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri serta sarana dan prasarana lainnya di Provinsi Kalimantan Barat yang diharapkan akan dapat meningkatkan investasi industri di Kalimantan Barat;
- (2) Meningkatkan nilai tambah produk (Hilirisasi) yang sejalan dengan perluasan pemasaran dan daya saing produk industri; peningkatan Inovasi, kapasitas dan efisiensi proses produksi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi (dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha industri; serta perumusan kebijakan daerah untuk mendukung industri) sehingga dapat mendongkrak kontribusi sektor industri Kalbar;
- (3) Mendorong seluruh Pemerintah Kab/Kota untuk segera menyelesaikan Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) yang selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat, sehingga akan tercipta keselarasan dalam rencana pembangunan industri antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dari sisi SDM, Sarana, dan prasarana industri;
- (4) Penguatan data industri dengan melakukan kerja sama dengan pihak BPS untuk mendapatkan data yang akuntabel serta mendapatkan kesamaan persepsi terkait klasifikasi data industri sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan.
- (5) Peningkatan nilai ekspor Kalbar baik jenis komoditi/produk yang diekspor maupun negara tujuan ekspor melalui perbatasan; peningkatan peran ekspor UKM/IKM; pencitraan & promosi produk/komoditi daerah; Pengelolaan impor; serta mempersiapkan Kalbar sebagai Pusat Perdagangan Nasional pada akhir RPJPD Prov. Kalbar.

- (6) Menjaga stabilitas Inflasi Kelompok Bahan Makanan melalui kegiatan-kegiatan untuk Menjaga stabilitas pasokan/stok dan harga. Hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan perbaikan sistem logistik daerah dalam rangka menjamin terjaganya ketersediaan pasokan/stok dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat.
- (7) Memberikan publikasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri; serta meningkatkan Pengawasan Barang Beredar terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Pontianak, Februari 2021  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SAMUEL, SE, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660408 199303 1 009



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telepon (0561) 732610 - 766127 - 732740 - 769704 - 734917 Fax. (0561) 766128  
PONTIANAK - 78116

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAMUEL, SE, M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum**  
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

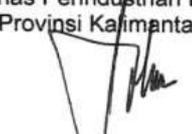
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Januari 2020

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
**H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum**

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  
Provinsi Kalimantan Barat,

  
**SAMUEL, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660408 199303 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN DI DALAM PDRB	1.1 Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	5,2 %
2	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI DI DALAM PDRB	2.1 Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	6,5 %

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Rp. 1.800.876.500,-	APBD
2.	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 1.619.065.000,-	APBN
3.	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Rp. 573.405.500,-	APBD
	Dukungan UPSMB	Rp. 3.462.286.000,-	APBD
	Dana Alokasi Khusus (DAK) UPSMB	Rp. 3.125.000.000,-	APBD
4.	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Rp. 1.779.687.000,-	APBN
5.	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Industri	Rp. 3.557.940.000,-	APBD
	Dukungan UPT IPOK	Rp. 2.597.906.000,-	APBD
6.	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp. 1.325.236.000,-	APBN
7.	Sekretariat	Rp. 3.484.738.900,-	APBD
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 23.326.140.900,-</b>	<b>APBD + APBN</b>

Pontianak, Januari 2020

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
**H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum**

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  
Provinsi Kalimantan Barat,

  
**SAMUEL, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660408 199303 1 009